

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA  
NGLANGGERAN: ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI DESA WISATA**

**Erica Indah Maulia<sup>1</sup>, Budi Setiyono<sup>2</sup>**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

*Collaborative governance* menjadi salah satu strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan multi aktor yang saling berkontribusi sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing membuat pengembangan pariwisata menjadi lebih efektif. Strategi kolaborasi ini terlihat cukup menjanjikan dengan implementasinya yang cukup menantang terutama dalam hal keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran melalui analisis model *collaborative governance* Ansell dan Gash dengan indikator yang digunakan yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen pada Proses, Berbagi Pemahaman, dan Hasil Sementara. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak digitalisasi desa wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kelima proses kolaborasi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga proses kolaborasi yang terjalin memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui kontribusi dan peran baik dari pihak pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga lainnya dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Namun kerberjalanan kolaborasi masih mendapatkan tantangan dan hambatan yaitu sulitnya menyelaraskan visi dari *stakeholder* yang kadang tidak mendukung konservasi lingkungan di Nglanggeran, belum meratanya distribusi manfaat, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan adanya regenerasi kepengurusan. Analisis kedua terkait digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran, digitalisasi menjadi faktor penunjang keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran dalam hal promosi dan pelayanan kepada wisatawan. Digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran telah dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial (*Facebook, Twitter/X, Instagram, Tiktok*), *website*, dan *blog*. Hasil penelitian menunjukkan digitalisasi memiliki dampak positif terutama dalam empat (4) aspek yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, perkembangan ekonomi masyarakat dari adanya kunjungan wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisata, dan peningkatan pemasaran destinasi wisata di Nglanggeran.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance, Stakeholder, Digitalisasi*

## **ABSTRACT**

*Collaborative governance is one of the right strategies in tourism development. The involvement of multi-actors who contribute to each other in accordance with their respective capabilities makes tourism development more effective. This collaboration strategy looks quite promising with its implementation which is quite challenging, especially in terms of sustainability. This study aims to analyze the collaborative governance process in the development of Nglanggeran Tourism Village through the analysis of Ansell and Gash collaborative governance models with the indicators used, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Process, Sharing Understanding, and Intermediate Outcomes. This research will also analyze the impact of digitalization of tourism villages. The method used in this study is qualitative to explore and understand the meaning given by individuals or groups to problems. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results showed that the five collaboration processes have been carried out well, so that the collaboration process that is established provides significant benefits to the community. This success was achieved through the contribution and good role of the government, community, private sector and other institutions in the development of Nglanggeran Tourism Village. However, the progress of collaboration still faces challenges and obstacles, namely the difficulty of aligning the vision of stakeholders who sometimes do not support environmental conservation in Nglanggeran, the uneven distribution of benefits, limited human resource capacity, and management regeneration. The second analysis is related to digitalization in Nglanggeran Tourism Village, digitalization is a supporting factor for the success of Nglanggeran Tourism Village in terms of promotion and service to tourists. Digitalization of Nglanggeran Tourism Village has been carried out through various platforms such as social media (Facebook, Twitter / X, Instagram, Tiktok), websites, and blogs. The results show that digitalization has a positive impact, especially in four (4) aspects, namely creating jobs for the community, economic development of the community from tourist visits, increasing the number of tourist visits, and increasing marketing of tourist destinations in Nglanggeran.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Stakeholders, Digitalization*

## PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam menyokong perekonomian negara terlebih di negara berkembang, seperti Indonesia. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah devisa sektor pariwisata pada tahun 2019-2021 mencapai USD 0,54 Miliar.<sup>1</sup> Pariwisata dapat memberikan dampak pada pembangunan dengan meningkatkan pendapatan daerah dan standar hidup dari masyarakat pedesaan maupun perkotaan, hal tersebut mendukung pernyataan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa negara. Pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian negara tentunya memerlukan sebuah strategi dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan perannya supaya dapat terus berkembang secara optimal.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menghilangkan kesenjangan perekonomian antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta upaya dalam menjaga kualitas lingkungan, yaitu melalui pembentukan konsep desa wisata.

Desa wisata menjadi konsep dalam pengembangan wilayah pedesaan yang mengangkat kearifan lokal dari tradisi, budaya, kehidupan masyarakat desa sehari-

hari, dan tata ruang desa. Desa Wisata adalah contoh nyata dari upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global.

Menurut Inskeep (1991) desa wisata merupakan sebuah tempat dengan identitas dan nilai tersendiri yang menarik pengunjung terhadap kehidupan tradisional di pedesaan (Hadiwijoyo, 2018). Implementasi dari konsep desa wisata difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk dapat memanfaatkan potensi desa yang ada seperti keindahan alam dan budaya yang asri dari desa tersebut (Ahsani, Suryaningsih, Ma'rifah, & Aerani, 2018).

Adanya keterbatasan dan kemampuan dari masyarakat dalam mengelola desa wisata tentu dibutuhkan peran dari pihak lain untuk membantu. Disamping itu juga banyaknya permasalahan kompleks dalam pengembangan pariwisata seperti permasalahan pengembangan destinasi wisata, permasalahan pengembangan pemasaran pariwisata, permasalahan pengembangan industri pariwisata, permasalahan kelembagaan kepariwisataan,

---

<sup>1</sup> Jumlah Devisa Sektor Pariwisata 2019-2021. Badan Pusat Statistik. 2021. Retrieved 4 November 2022 from

<https://www.bps.go.id/indicator/16/1160/1/jumlah-devisa-sektor-pariwisata.html>

dan permasalahan pembangunan ekonomi kreatif.<sup>2</sup>

Pengembangan pariwisata dengan segala permasalahan yang kompleks tentunya membutuhkan kerjasama atau *collaborative governance* yang efektif dengan para *stakeholder* lainnya. *Collaborative governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keterbatasan pemerintah dalam mengelola pariwisata sebagai langkah dalam mewujudkan perkonomian yang stabil di masyarakat. Pemerintah harus bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai aktor non-pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pariwisata.

*Collaborative governance* merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam menangani berbagai permasalahan atau isu-isu publik di masyarakat, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Ansell dan Gash, 2008).

Keterlibatan pihak non-pemerintah dalam membangun atau mengelola pariwisata tentunya akan membuat pelaksanaan dari kebijakan pemerintah

dalam kepariwisataan akan lebih optimal dengan adanya hubungan kolaborasi yang dijalankan tersebut.

Di masa revolusi industri 4.0 perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu pesat, hal tersebut tentu mendorong berbagai sektor agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada, termasuk sektor pariwisata. Strategi dalam sektor pariwisata dengan mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan *digital tourism*. *Digital tourism* menjadi strategi yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan melalui promosi destinasi dan potensi wisata secara digital/*online*. Penggunaan teknologi informasi dalam sektor pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang bisnis bagi penduduk setempat (Agung, 2015).

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi besar yang memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah untuk pengembangan pariwisata lebih lanjut. Dalam rangka mewujudkan target menjadi destinasi wisata unggulan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berusaha meningkatkan berbagai potensi

---

<sup>2</sup> Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved 21 November 2022, from

[https://eperformance.kememparekraf.go.id/stora ge/media/993/RENSTRA-KEMENPAREKRAF\\_BAPAREKRAF-2020-2024.pdf](https://eperformance.kememparekraf.go.id/stora ge/media/993/RENSTRA-KEMENPAREKRAF_BAPAREKRAF-2020-2024.pdf)

yang dimiliki, seperti wisata alam yang khas dengan keindahan pantai, pegunungan dan bukit, serta berbagai jenis kebudayaan khas dari Yogyakarta (Jamalina & Wardani, 2017).

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten di provinsi DIY yang sedang gencar memasarkan pariwisata. Salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang telah banyak disorot karena berbagai keberhasilan yang diraih yaitu Desa Wisata Nglanggeran di Kecamatan Patuk. Desa Wisata Nglanggeran sudah banyak meraih penghargaan di kancah internasional, seperti meraih penghargaan ASEAN *Community Based Tourism* (CBT) award 2017 yang diselenggarakan di Singapura, mendapatkan penghargaan sebagai *Best Tourism Village* dari *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 2021<sup>3</sup>, dan pada tahun 2020 Desa Wisata Nglanggeran terpilih menjadi salah satu desa wisata digital yang dijadikan percontohan untuk desa wisata lainnya khususnya di DIY maupun Indonesia untuk dapat mengembangkan desa wisata digital.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Desa Wisata Nglanggeran dapat penghargaan Asean CBT. (2017). Retrieved 18 November 2022, from <https://jogja.antaranews.com/berita/344384/desa-wisata-nglanggeran-dapat-penghargaan-asean-cbt>

<sup>4</sup> Kembangkan Desa Wisata Digital, Nglanggeran Tandatangani Berita Acara Serah

Desa Wisata Nglanggeran di bawah pengelolaan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pemerintah yang dinilai sudah tepat dan baik dalam mengelola potensi desa wisata tersebut dapat membuat Desa Wisata Nglanggeran memiliki peluang tinggi untuk menjadi tujuan wisata dengan potensi wisata yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan.

Adanya hubungan kerjasama antara Pokdarwis dengan para *stakeholder* secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan potensi wisata di Desa Wisata Nglanggeran, terutama pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nglanggeran. Desa Wisata Nglanggeran banyak berkolaborasi dengan para *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata seperti dari pihak pemerintah, swasta, NGO, dan akademisi.

Salah satu penunjang keberhasilan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran yaitu adanya digitalisasi. Promosi media digital Desa Wisata Nglanggeran sebagai destinasi wisata merupakan salah satu inisiatif penunjang keberhasilan desa tersebut. Kemajuan teknologi digital membuat akses

Terima Dengan Kementerian Pariwisata - Warta Jogja. (2020). Retrieved 25 November 2022, from <https://wartajogja.co.id/kembangkan-desa-wisata-digital-nglanggeran-tandatangani-berita-acara-serah-terima-dengan-kementerian-pariwisata/>

informasi bagi wisatawan menjadi mudah, cepat dan efisien.

Adanya *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan implementasi dari *digital tourism* dalam hal promosi desa wisata di Nglanggeran membuat Desa Wisata Nglanggeran dikategorikan sebagai desa wisata yang berhasil dan berkelanjutan. Penerapan digitalisasi yang menjadi salah satu strategi pemasaran desa wisata menjadi hal menarik untuk dikaji. Keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran tentu terdapat peran dan tanggung jawab dari para aktor dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Berangkat dari hal tersebut yang kemudian akan dikaji lebih dalam mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

## KERANGKA TEORI

### *Collaborative Governance*

Menurut Ansell dan Gash (2008)

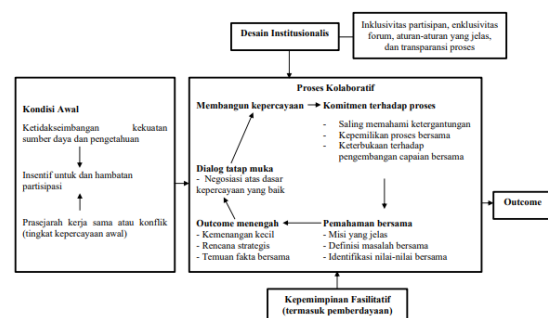
*collaborative governance* merupakan suatu pendekatan dalam manajemen kebijakan yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Ansell & Gash, 2008).

Konsep *collaborative governance* digunakan sebagai respon dari adanya

permasalahan-permasalahan yang bersifat kompleks dan dinamis, sehingga akan sangat tidak mungkin apabila hanya diselesaikan oleh satu pihak yaitu pemerintah, namun perlu adanya sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya. Kolaborasi merupakan bentuk dari kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dari beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima dampak dan manfaat (Haryono, 2012).

*Collaborative governance* memfokuskan perhatiannya pada bagaimana kolaborasi tersebut dapat membentuk kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adil. Berikut model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash:

Gambar 1 Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash



Ansell dan Gash (2008)

mengembangkan sebuah kerangka kerja yang memecah *collaborative governance* menjadi empat dimensi utama yang dapat dilihat di gambar, yaitu kondisi awal (*starting condition*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), desain

kelembagaan (*intititutional desain*) dan proses kolaborasi. Terdapat lima (5) indikator dalam dimensi proses kolaborasi yang saling memiliki keterkaitan. Berikut adalah proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008):

**1. Dialog Tatap muka (*face to face dialog*)**

Tahap awal dari proses kolaborasi ini adalah memfasilitasi dialog tatap muka antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam masalah kebijakan yang kompleks. Dialog ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi, menyatakan pandangan, dan mengidentifikasi isu-isu utama. Komunikasi langsung seperti ini membantu dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara pemangku kepentingan.

**2. Membangun Kepercayaan (*trust building*)**

Pembangunan kepercayaan adalah unsur kunci dalam kolaborasi. Selama dialog tatap muka awal, pemangku kepentingan perlu membangun rasa saling percaya satu sama lain. Ini dapat dicapai melalui pembentukan hubungan personal, pertukaran informasi yang jujur, dan berkomitmen untuk memahami

perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Kepercayaan yang kuat menjadi dasar untuk keberhasilan kolaborasi.

**3. Komitmen untuk Memproses (*commitment to process*)**

Tahap selanjutnya adalah menciptakan komitmen bersama untuk melanjutkan proses kolaborasi. Pemangku kepentingan harus setuju untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini dan untuk tetap terlibat dalam jangka waktu yang dibutuhkan. Komitmen ini menciptakan dasar untuk kerja sama yang berkelanjutan dan untuk mencapai hasil yang bermakna.

**4. Berbagi Pemahaman (*sharing understanding*)**

Setelah kepercayaan dibangun dan komitmen tercapai, pemangku kepentingan perlu berbagi pemahaman mereka tentang masalah kebijakan yang sedang dihadapi. Ini melibatkan berdiskusi mendalam tentang isu-isu kunci, data yang relevan, dan berbagai pandangan yang ada. Pada tahap ini, pemangku kepentingan berusaha untuk memahami perspektif masing-masing dan mencapai pemahaman bersama tentang akar masalah dan solusi yang mungkin.

## 5. Hasil Sementara (*intermediate outcomes*)

Selama proses kolaborasi, berbagai tahapan dapat menghasilkan hasil sementara atau *intermediate*. Ini dapat mencakup kesepakatan awal tentang langkah kebijakan, rencana atau konkret lainnya yang diambil oleh pemangku kepentingan. Hasil sementara ini mencerminkan kemajuan dalam mencapai tujuan kolaboratif. Hal ini juga dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk menilai efektivitas kolaborasi dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

### **Digital Tourism sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata**

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang diuntungkan dengan maraknya inovasi digital yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi saat ini, khususnya dalam bentuk inovasi pengembangan produk layanan wisata (Kusumastuti, Handoko, & Wijaya, 2022).

Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pariwisata dikenal dengan *digital tourism*. *Digital tourism* merupakan integrasi antara perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan industri pariwisata. Konsep *digital tourism* ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi di sektor pariwisata,

menyediakan berbagai layanan pariwisata kepada pelanggan, dan membuat proses pemasaran pariwisata menjadi lebih mudah diakses melalui media digital atau secara online (Yanti, 2019).

Beberapa dampak dari *digital tourism* atau digitalisasi dalam pariwisata yang penulis temukan dari berbagai hasil penelitian, antara lain:

1. Digitalisasi sektor pariwisata memiliki dampak sosial, dimana menciptakan lapangan kerja dan daya saing yang berkelanjutan (Ernawati & Hananto, 2023).
2. Adanya *digital tourism* memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat melalui kunjungan para wisatawan (Simamora, 2023)
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor pariwisata (*digital tourism*) memiliki dampak positif pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara (Laba, Semara, & Tunjungsari, 2018).
4. *Digital tourism* memiliki dampak pada meningkatnya pemasaran destinasi (Murti, Kusumastuti, Handoko, & Wijaya, 2022)

### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini berupaya dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan



situasi aktual yang dialami di lapangan, dan dilakukan analisis mendalam untuk melihat setiap fenomena. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada pengembangan topik penelitian yang memungkinkan mereka untuk melakukan observasi langsung secara mendalam. Dengan memperhatikan beberapa indikator proses dalam *collaborative governance*, peneliti dalam penelitian ini berupaya memberikan analisis secara detail mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran dan dampak digitalisasi desa wisata melalui gambaran situasi aktual yang terjadi di lapangan. Situs penelitian ada di Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Subjek yang digunakan yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Nglanggeran, Pokdarwis, Masyarakat, dan NGO Indecon. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, keberadaan pemangku kepentingan eksternal seperti pihak swasta

atau lembaga non-pemerintah juga menjadi sangat penting, meskipun masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata Nglanggeran. *Collaborative governance* menjadi langkah yang tepat dalam mengembangkan desa wisata. *Stakeholder* yang berkolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, antara lain: Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa Nglanggeran, pihak swasta yaitu Grup Putri Kedaton dan Traveloka, pihak CSR yang tidak bergerak di bidang usaha pariwisata yaitu Pertamina dan Bank Indonesia; NGO Indecon; dan pihak akademisi dari Universitas Pancasila.

Setiap aktor memiliki peran dan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Berikut berikut hasil analisis keterlibatan aktor dan perannya dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran:

1. Pemerintah, baik dari pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Desa berperan menjadi regulator/ pembuat regulasi, pembina, dan pemberi bantuan dalam pembangunan infrastruktur.
2. Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan utama melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran berperan sebagai subjek dan pelaksana

- kegiatan pariwisata. Mereka juga menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pertama dari kegiatan pariwisata. Mereka berperan dalam menjadi promotor, motivator, dan fasilitator.
3. Swasta, pihak Grup Putri Kedaton yang berperan terkait pendampingan kelompok Griya Spa, sedangkan pihak agen Traveloka memiliki peran dalam promosi *homestay* di Desa Wisata Nglanggeran.
  4. CSR, pihak Pertamina berperan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok tani. Sementara pihak Bank Indonesia sebagai pihak CSR juga memiliki peran dalam membantu manajemen tata kelola desa wisata, pembuatan SOP seperti pemanduan wisata, pembangunan sarana dan prasarana, dan SOP terkait mengatur pola perjalanan wisatawan. Selain itu BI juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok PKK dalam pengolahan kakao di Griya Coklat Nglanggeran.
  5. NGO, Indecon (*Indonesia Eutourism Network*) berperan sebagai mentor, dan pendamping dalam pengembangan desa wisata yaitu membentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kalurahan (RIPPARKAL) Nglanggeran.
  6. Akademisi, Universitas Pancasila berperan dalam mendukung dan

membantu dalam pembuatan perencanaan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

Peneliti mendapatkan hasil bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran menciptakan hasil yang optimal. Kolaborasi yang terjalin berdampak positif bagi setiap aktor dimana mereka saling menerima manfaat (*sharing benefit*) dari kolaborasi tersebut. Proses kolaborasi yang dijalankan sudah terlaksana dengan baik dibuktikan dengan adanya lima (5) indikator yang terpenuhi, yaitu Dialog tatap muka (*Face to face dialog*), Membangun kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen pada proses (*Commitment to process*), Berbagi pemahaman (*sharing understanding*), dan Hasil sementara (*Intermediate outcomes*). Keberhasilan dari proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran diukur dari adanya dampak dan manfaat nyata yang dirasakan. Keberhasilan dalam proses kolaborasi ini didukung dari adanya kontribusi dari berbagai pihak yang sesuai dengan perannya masing-masing.

Lima (5) indikator dalam proses kolaborasi oleh Ansell & Gash implementasinya dalam proses kolaborasi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **1. Dialog tatap muka (*Face to face dialog*)**

Indikator ini sudah dilaksanakan dalam proses kolaborasi pengembangan Desa

Wisata Nglanggeran dimana dialog tatap muka ini dilakukan di awal sebelum kolaborasi dijalankan untuk dilakukan pemaparan rencana dari program.

## **2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)**

Kepercayaan dalam proses kolaborasi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terbangun dari adanya faktor-faktor seperti integritas, transparansi, dan konsistensi dalam bertindak sehingga membentuk dasar untuk memperkuat kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

## **3. Komitmen pada proses (*Commitment to process*)**

Komitmen dari para pihak ditunjukkan dari adanya kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi dan juga adanya perjanjian kerja sama dalam bentuk MoU, selain itu komitmen pada proses ditunjukkan dari adanya langkah konkret dari para pihak.

## **4. Berbagi pemahaman (*Sharing Understanding*)**

Indikator berbagi pemahaman dilakukan dalam musyawarah dimana setiap pihak memiliki keterbukaan satu sama lain dan aktif untuk mengemukakan pandangan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait dengan isu atau keputusan yang diambil.

## **5. Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)**

Indikator ini telah terpenuhi dalam proses kolaborasi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran yaitu dimana setiap *stakeholder* sudah menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik.

Berikutnya Peneliti mendapatkan hasil bahwa penerapan konsep *digital tourism* di Desa Wisata Nglanggeran menghasilkan temuan signifikan terkait dampak sosial dan ekonomi. Secara sosial, implementasi ini menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak positif pada masyarakat dari pemberdayaan yang dilakukan. Pembentukan Griya coklat, Griya Spa, dan Griya Batik menjadi pilar utama dalam menciptakan pekerjaan lokal, memberikan peluang ekonomi bagi warga desa. Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan ini memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Dampak ekonomi juga terlihat melalui peningkatan pendapatan wisata. Jumlah wisatawan yang meningkat membawa kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Distribusi pendapatan dari sektor wisata juga berdampak pada pemerataan ekonomi di masyarakat desa. Selain itu, pemasaran destinasi yang ditingkatkan melalui konsep *digital tourism*

memberikan dampak positif pada daya tarik Desa Wisata Nglanggeran sebagai destinasi wisata, meningkatkan ketertarikan wisatawan, dan secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengambilan data baik dari data primer maupun sekunder yang dilakukan peneliti, bahwa kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan wisata. Keberhasilan ini dicapai melalui kontribusi baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya dalam pengembangan wisata Nglanggeran. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada, pengelola Desa Wisata Nglanggeran pun telah melakukan tanggung jawab dengan baik dalam mengelola wisata, sementara itu dorongan dan dukungan pihak lain seperti Pihak Swasta, CSR, dan NGO juga berdampak besar bagi keberhasilan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran melalui banyak pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan.

Proses kolaborasi yang dijalankan sudah terlaksana dengan baik dibuktikan dengan adanya lima (5) indikator yang terpenuhi, yaitu Dialog tatap muka (*Face to face dialog*), Membangun kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen pada proses

(*Commitment to process*), Berbagi pemahaman (*sharing understanding*), dan Hasil sementara (*Intermediate outcomes*).

Terlepas keberhasilan proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, masih terdapat hambatan dan tantangan, yaitu tantangan dalam menyelaraskan visi dari beberapa *stakeholder* yang menawarkan kolaborasi tetapi terkadang tidak mendukung konservasi lingkungan di Nglanggeran, tantangan dalam mendistribusikan manfaat kolaborasi secara merata karena pengembangan wisata hanya terfokus pada satu dusun yaitu di dusun Nglanggeran Wetan, dan terbatasnya kapasitas sumber daya Pokdarwis dimana anggota Pokdarwis berlatarbelakang sebagai masyarakat desa yang beraktifitas di ladang sehingga kurang menguasai terkait pengelolaan wisata. Hambatan dari proses kolaborasi ini, yaitu adanya perubahan atau regenerasi kepengurusan di instansi atau perusahaan yang terlibat dalam kolaborasi, hal ini tentu menyebabkan pengulangan dalam pembahasan rencana program yang akan dijalankan kepada pengurus atau anggota baru.

Terkait digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran, bahwa penerapan konsep *digital tourism* di Desa Wisata Nglanggeran menghasilkan dampak signifikan bagi masyarakat terutama dalam empat (4) aspek yaitu menciptakan lapangan kerja bagi

masyarakat melalui pembentukan Griya Coklat, Griya Spa, dan Griya Batik; perkembangan ekonomi masyarakat dari adanya kunjungan wisata; Peningkatan jumlah kunjungan wisata di Nglanggeran; dan peningkatan pemasaran destinasi wisata di Nglanggeran. Tetapi pada aspek peningkatan kunjungan wisata belum optimal, peningkatan pengunjung hanya pada empat tahun pertama tetapi peneliti mendapati temuan yang di luar ekspektasi dimana jumlah pengunjung tidak mempengaruhi pada pendapatan yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena Pokdarwis mengubah segmentasi pasar kepada perusahaan dan organisasi sehingga wisatawan yang berkunjung tidak hanya membeli tiket masuk wisata saja tetapi mereka juga melakukan wisata edukasi, oleh karena itu pendapatan tidak terpengaruh dari jumlah pengunjung.

## **SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran tidak lepas dari adanya sinergi antar aktor dalam kolaborasi tersebut. Hasil penelitian pada analisis dampak digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran juga menunjukkan dampak yang signifikan di masyarakat terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Dibalik keberhasilan dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan dan tantangan.

Oleh karena itu, saran yang dapat peneliti berikan, antara lain:

- a. Upaya untuk menyelaraskan visi dengan *stakeholder* yang kurang mendukung konservasi lingkungan di Nglanggeran diperlukan komunikasi yang efektif, dimana perlu adanya komunikasi yang terbuka dan jujur dari para pihak. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran harus dapat menyampaikan ide, kekhawatiran, dan harapan secara tegas dengan tetap menghormati pandangan pihak lain.
- b. Pendistribusian manfaat agar merata dimulai dari pengelolaan dan pengembangan wisata pada seluruh dusun di Nglanggeran tidak hanya terfokus pada satu daerah tetapi kesemua dusun agar tidak adanya rasa kecemburuan di masyarakat, sehingga manfaat dari pariwisata pun akan meluas ke seluruh masyarakat.
- c. Terbatasnya kapasitas sumber daya Pokdarwis, Pokdarwis diharapkan untuk terus melakukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan agar dapat mengelola program kepariwisataan dengan lebih efisien.
- d. Regenerasi kepengurusan, diperlukan dokumentasi secara rinci terkait prosedur dan rencana agar pergantian kepengurusan tidak menghambat kelangsungan program yang akan dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. (2015). Pengembangan Model Wisata Edukasi-Ekonomi Berbasis Industri Kreatif Berwawasan Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2).
- Ahsani, R., Suryaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Ilmu Administrasi Publik*, 2, 135-146.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Avoyan, E., Tatenhove, J., & Toonen, H. (2017). The Performance of the Black Sea Commission as a collaborative governance regime. *ELSEVIER*, 81, 285-292.
- Ernawati, H., & Hananto, K. (2023). Pariwisata Digital: Perspektif dan Agenda Riset Masa Depan. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 144-156.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Semarang: Suluh Media.
- Hamid, R., Albahri, A., Alwan, J., Al-qaysi, Z., Albahri, O., Zaidan, A., . . . Zaidan, B. (2021). How Smart is e-tourism? A Systematic Review of Smart Tourism Recommendation System Applying Data Management. *ELSEVIER*, 39.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1), 47-53.
- Ikeanyibe, O. M. (2018). Uniformity in Local Government System and the Governance Model in Migeria. *Sage Journals*, 53(1), 147-161.
- Jamalina, I., & Wardani, D. (2017). Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Konsep Community Based Tourism (CBT) dan Manfaat Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul. *Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18, 71-85.
- Kusumastuti, Z., Handoko, V., & Wijaya, A. (2022). Peningkatan Digitalisasi Pariwisata di Wilayah Desa Purwoharjo, Kulon Progo. *Jurnal Atma Inovasia*, 2(1), 14-19.
- Laba, I., Semara, I., & Tunjungsari, K. (2018). Dampak Terpaan Informasi Media Digital terhadap Perkembangan Pariwisata dan Perilaku Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 8(2), 178.
- Mumtaz, A., & Karmillah, M. (2021). Digitalisasi Wisata di Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1).
- Murti, D., Kusumastuti, Z., Handoko, V., & Wijaya, A. (2022). Peningkatan Digitalisasi Pariwisata di Wilayah Desa Purwoharjo, Kulon Progo. *Jurnal Atma Jaya*, 2.
- Simamora, A. S. (2023). Pengaturan Digital Tourism dalam Pariwisata di Kawasan Toba Berdasarkan PERMENPAREKRAF Nomor 12 Tahun 2020. *Jurnal Kertha Desa*, 11(5), 2427-2438.

- Tiyasmono, D. K. (2020). Identifikasi Modal Dalam Pengembangan Wisata Alam Di Desa Nglanggeran.
- Yanti, D. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Digital Tourism Sebagai Promosi Pariwisata Di Toba Samosir. *Jurnal Darma Agung*, 27(1), 814-821.